

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA SERTA DAMPAK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN DELI SERDANG

Arfah Lubis¹, Eka Nurmala Sari², Widia Astuty³

¹) Mahasiswa Program Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

^{2,3}) Dosen Program Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : arfahlubis1@gmail.com ; ekanurmala@umsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap sistem pengelolaan dana desa serta dampaknya terhadap kinerja pemerintah desa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian ini sebanyak 162 aparatur desa dari 54 desa. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala Likert. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis jalur. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh langsung kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi terhadap sistem pengelolaan dana desa. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa terdapat pengaruh langsung kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan sistem pengelolaan dana desa terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil uji Sobel juga membuktikan bahwa sistem pengelolaan dana desa merupakan intervening positif antara pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memberikan pengaruh secara langsung sebesar 12,8% terhadap kinerja pemerintahan desa, tetapi akan lebih baik jika melalui sistem pengelolaan dana desa yaitu sebesar 15,8% (pengaruh tidak langsung). Pemanfaatan teknologi memberikan pengaruh secara langsung sebesar 14,7% terhadap kinerja pemerintahan desa, tetapi akan lebih baik jika melalui sistem pengelolaan dana desa yaitu sebesar 40,6% (pengaruh tidak langsung).

Kata Kunci: *Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi, Sistem Pengelolaan Dana Desa, Kinerja Pemerintah Desa*

PENDAHULUAN

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni dana desa. Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima secara bertahap. Adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Tetapi dengan adanya dana desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaannya, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan

peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan.

Secara umum, sejak program dana desa dijalankan tahun 2015, begitu banyak permasalahan yang terekam di antaranya adanya pemotongan dari pemerintah kabupaten seperti di Jawa Timur; penyimpangan dana desa seperti di NTT; masalah administratif seperti birokrasi penyaluran dana yang berbelit serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang

kurang lengkap atau tidak lengkapnya dokumen yang disyaratkan seperti Peraturan Bupati, APBD dan Desa (APBDes), dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa yang memuat peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa; kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan dana serta minimnya kualitas sumber daya manusia; kurangnya pendampingan dan kualitas pendamping; dan minimnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa (Lengkong dan Tasik, 2018:16).

Sari (2010:127), menjelaskan bahwa “penyelenggaraan pemerintahan yang baik membutuhkan diterapkannya prinsip-prinsip *good governance*, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan daerah”. Menurut Sari (2013:25), “konsep *good governance* merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh sektor publik khususnya adalah pemerintah daerah”. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih responsif atau cepat dan tanggap. Oleh karena itu, pemerintah daerah/desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.

Fakta di lapangan selama ini, menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan desa masih sangat kurang khususnya terkait dengan dana desa. Hal ini terlihat dari pertanggungjawaban dan pelaporan mengenai dana desa pada pemerintahan desa di beberapa desa di Indonesia masih belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan inventarisir setidaknya terdapat 14 potensi permasalahan yang mencakup aspek regulasi dan kelembagaan, tatalaksana, pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Lembaga Swadaya Masyarakat ICW dalam laporan tahunannya menuliskan teridentifikasi tujuh bentuk korupsi yang umumnya dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap (Ash-shidiqq dan Wibisono,

2018:111). Pada tahun 2017, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga menemukan lebih dari 15.000 kasus terkait lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa.

Kabupaten Deli Serdang yang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara sendiri memiliki 380 desa yang merupakan terbanyak ke-4 di Provinsi Sumatera Utara, tantangan akan penggunaan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemanfaat yang sesuai guna mendukung kinerja pada sektor publik dirasa perlu untuk dilakukan dan diterapkan oleh desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang, sebab sejak digulirkannya dana desa pada pertengahan tahun 2015, sejumlah permasalahan dan penyelewengan dana desa terjadi di Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019, dijelaskan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan yaitu: tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20%; tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40%; dan tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40%. Namun fakta yang ada, penyaluran dana desa selalu mengalami keterlambatan seperti halnya penyaluran Dana Desa tahap I baru diterima sebagian besar desa di Kabupaten Deli Serdang pada bulan Juli sedangkan tahap II diterima di bulan Agustus. Beberapa hal yang menjadi kendala dan keterlambatan dalam penyaluran dana desa adalah dikarenakan persyaratan yang ditentukan tidak atau

kurang dipenuhi seperti APB Desa belum atau terlambat ditetapkan, perubahan regulasi, dan keterlambatan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa.

Fenomena keterlambatan penyaluran Dana Desa termasuk di Kabupaten Deli Serdang juga mengindikasikan masih kurang atau buruknya kinerja pemerintahan desa, salah satunya terkait laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya. Serta fungsi pengawasan yang dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai masih kurang maksimal sehingga pelaksanaan pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi terjerat kasus hukum. Bahkan hingga saat ini Pihak Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, masih terus menerima pengaduan dari warga masyarakat atas dugaan penyelewengan dana desa yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa.

Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa terkait dana desa diantaranya sistem pengelolaan dana desa, kualitas sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi dan lainnya. Adanya pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan desa dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah desa yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana desa di beberapa desa di Kabupaten Deli Serdang masih belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan dana desa juga sering kali menimbulkan berbagai masalah lain yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan seperti kecurangan yang dilakukan oleh

oknum pihak pemerintah desa. Kurnia seperti dikutip Hendri, dkk, (2016:545), menjelaskan bahwa: berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2014, pemerintah desa masih mengalami berbagai hambatan dalam pengelolaan keuangan desa, di antaranya masalah kondisi tata kelola desa dan sarana prasarana yang bervariasi, kualitas SDM (termasuk aparat kecamatan), dan pembinaan APIP Kabupaten/ Kota yang belum didukung SDM memadai. Akibatnya, masih terdapat desa yang belum menyusun RKPDesa, dana dari bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten tidak disajikan dalam RAPBDesa dan realisasinya, belum adanya prosedur untuk menjamin tertib administrasi dan kekayaan milik desa, serta proporsi penggunaan ADD yang belum sesuai ketentuan 30% operasional dan 70% pemberdayaan.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem pengelolaan dana desa adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Astuty (2015:82), menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan sebagian besar dipengaruhi oleh manusia pelaksananya. Lebih lanjut menurut Astuty (2012:163), “peran manusia dalam anggaran sangat besar karena seluruh tahapan anggaran melibatkan manusia, anggaran dibuat oleh manusia, diperbaiki oleh manusia, dan pencapaiannya dilaksanakan oleh manusia”. Ndraha dalam Firdaus, dkk (2015:47), menjelaskan bahwa SDM yang berkualitas adalah sumber daya yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti kecerdasan, kreativitas, dan imajinasi.

Namun kenyataan yang ada masih menunjukkan kualitas SDM di beberapa pemerintahan desa khususnya di Kabupaten Deli Serdang masih sangat kurang. Hal ini ditunjukkan dari beberapa kasus korupsi dana desa serta adanya dugaan

penyelewengan dana desa di beberapa desa di Kabupaten Deli Serdang. Beberapa contoh kasus korupsi dan penyelewengan dana desa diantaranya yaitu kasus korupsi penyimpanan dana desa sebesar Rp. 782 juta pada tahun anggaran 2016 yang dilakukan oleh Kepala Desa Percut Kecamatan Percut Seituan yang berinisial CA. Kerugian negara atas kasus korupsi dana desa itu mencapai Rp. 400 juta dan uang tersebut digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi (Merdeka.com, 2017). Kasus lainnya yaitu kasus korupsi dana desa yang dilakukan Plt Kepala Desa Paya Itik Kecamatan Galang berinisial M yang terbukti melakukan korupsi APBDesa dengan merugikan negara sebesar Rp. 162.505.000 untuk tahun 2016 sampai tahun 2017 (Tribun-Medan.com, 2019).

Fenomena tentang kasus korupsi dana desa serta adanya dugaan penyelewengan dana desa di beberapa desa di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan kualitas SDM yang masih kurang terkait pengelolaan dana desa. Kepala desa selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa dituntut agar lebih kompeten dan akuntabel dalam mengelola dana desa. Terlebih lagi kemampuan sebagian besar SDM yang mengelola keuangan desa dan yang mengawasi juga diragukan dan menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, kepala desa dan perangkat desa yang terkait dengan sistem pelaporan keuangan harus memiliki SDM yang berkualitas.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kinerja pemerintahan desa terkait pengelolaan dana desa adalah pemanfaatan teknologi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk

mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Namun, kenyataan di beberapa desa di Kabupaten Deli Serdang masih terdapat beberapa kendala dalam pemanfaatan teknologi seperti masih kurang atau lemahnya jaringan internet dan tidak tersedianya jaringan wifi di beberapa kantor desa, kondisi perangkat komputer yang masih kurang baik, serta sering terjadi pemadaman listrik yang dapat menghambat penggunaan perangkat komputer. Teknologi informasi yang ada, tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
2. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
3. Apakah sistem pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
4. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa?
5. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa?
6. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa?

7. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa?

KAJIAN TEORITIS

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Kinerja pada pemerintah desa merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dana desa dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kemampuan desa dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kinerja pemerintah desa juga merupakan kemampuan pemerintahan desa untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli desa dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan desanya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat desa dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa. Hasil penelitian yang dilakukan Warisno seperti dikutip oleh Firdaus, dkk (2015:47), mengemukakan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik SKPD harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hasil penelitian Hendri, dkk (2016), menunjukkan bahwa terdapat arah hubungan yang positif dan signifikan sumber daya manusia terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Munti dan Fahlevi (2017), menyimpulkan bahwa kapasitas aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Lebih

lanjut hasil penelitian Rulyanti, dkk (2017), menyimpulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dan kinerja pemerintah desa. Hasil penelitian Wardani dan Andriyani (2017), menyimpulkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja..

Menurut Yosefrinaldi (2013:12), semakin besar pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud seperti penggunaan komputer dan perangkat lunak secara optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya juga akan memiliki tingkat keakurasian yang tinggi sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang tepat waktu karena pemanfaatan teknologi akan

mengurangi kesalahan yang bersifat material (Primayana, 2014:10).

Melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi akan memberikan kemudahan kepada pihak pemerintah desa untuk memperoleh informasi keuangan dan kinerja dari pengelolaan keuangan pemerintah desa. Hasil penelitian Firdaus, dkk (2015), menyimpulkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian Aziiz dan Prastiti (2019), juga menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai dengan Peraturan Kepala Daerah. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan baik apabila ketiga perspektif tersebut diatas berjalan dengan baik, karena pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya, dan apabila dari ketiga perspektif salah satunya tidak berjalan dengan lancar ini berarti pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dana Desa tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Adanya pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mempengaruhi kinerja pemerintah desa, dimana semakin tinggi aturan yang diterapkan oleh perangkat desa maka akan meningkatkan kualitas kinerja perangkat desa (Rulyanti, dkk, 2017:324). Hasil penelitian Sugeng (2014), menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola dengan efektif, efisien, transparan dan

akuntabel maka hal tersebut dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah khususnya pada sektor pemenuhan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Adanya pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan desa dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah desa yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Kepala desa memiliki wewenang dalam penyelenggaraan seluruh pengelolaan keuangan desa karena kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan. Sedangkan perangkat desa merupakan pelaksana teknis dalam kegiatan pengelolaan keuangan. Perangkat desa ditunjuk langsung oleh kepala desa untuk pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa harus kompeten dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, kepala desa dan perangkat desa yang terkait dengan sistem pelaporan keuangan harus memiliki sumber daya yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas tersebut harus didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sumber daya yang berkualitas dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena SDM tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu (Sembiring, 2013:2). Semakin cepat waktu

penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002:146). Oleh sebab itu diperlukan adanya pengoptimalisasian sumber daya manusia dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya.

Hasil penelitian Rulyanti (2017), menyimpulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Sapartiningsih, dkk (2018), menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Yesinia, dkk (2018), juga menyimpulkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian Aziiz dan Prastiti (2019), menyimpulkan kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Sementara itu, hasil penelitian Firdaus, dkk (2015), menyimpulkan bahwa secara parsial kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa akan memberikan kemudahan bagi aparatur desa dalam menjalankan berbagai tugas di pemerintahan. Untuk itu aparatur harus mempunyai pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi seperti komputer, *software*, dan jaringan internet. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi saat melakukan pemrosesan data keuangan serta menghasilkan informasi keuangan dengan tepat waktu.

Triani dan Handayani (2018:140), menyebutkan bahwa “teknologi juga akan sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan”. Sehubungan hal tersebut,

pemerintah daerah diharapkan hadir untuk mendampingi perangkat desa dalam mengelola keuangannya. Studi yang dilakukan Indriasari dan Nahartyo dalam Triani dan Handayani (2018:146), menunjukkan bahwa keterlambatan laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi.

Hasil penelitian Sapartiningsih, dkk (2018), menyimpulkan bahwa ada pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Aziiz dan Prastiti (2019), menyimpulkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Melalui Sistem Pengelolaan Dana Desa

Kinerja pemerintah desa merupakan tingkat capaian dari suatu hasil kerja termasuk di bidang keuangan desa yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Kualitas SDM merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa.

Afrianti dalam Wardani dan Andriyani (2017:89), menyatakan bahwa “kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai”. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, perangkat desa harus memiliki SDM yang berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan.

Meskipun demikian, pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa dalam

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.. Pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai dengan Peraturan Kepala Daerah. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan dana desa dapat dikatakan baik apabila ketiga perspektif tersebut diatas berjalan dengan baik, karena pengelolaan dana desa telah sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya, dan apabila dari ketiga perspektif salah satunya tidak berjalan dengan lancar ini berarti pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kinerja pemerintahan desa selain dipengaruhi oleh faktor kualitas sumber daya manusia juga dipengaruhi oleh sistem pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel. Keberhasilan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari komitmen yang tinggi dari aparatur desa dan didukung kompetensi yang dimiliki. Pelaksanaan pemerintahan membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi dari setiap program. Dari setiap tahapan tersebut pelaksanaan pengelolaan keuangan desa termasuk pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan baik agar tujuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Sistem pengelolaan dana desa yang baik dapat dilihat dari keselarasan tujuan antara aparatur desa dengan tujuan dari desa itu sendiri.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Melalui Sistem Pengelolaan Dana Desa

Penggunaan teknologi informasi merupakan penunjang dalam melakukan berbagai pekerjaan sebagai media informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan atau dana desa akan memberikan kemudahan bagi aparatur desa dalam menjalankan

berbagai tugas di pemerintahan. Salah satu manfaat dari penggunaan teknologi informasi terkait pengelolaan keuangan atau dana desa yaitu memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan dan dana desa yang lebih akuntabel. Penggunaan teknologi jaringan internet juga memberikan kemudahan kepada aparatur desa dalam memperoleh informasi terkait kepentingan pemerintah serta masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi. Untuk mencapai kinerja keuangan yang baik maka pemerintahan desa harus mempunyai pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi seperti komputer, *software*, dan jaringan internet sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan kemudahan kepada aparat desa dalam memenuhi kewajibannya.

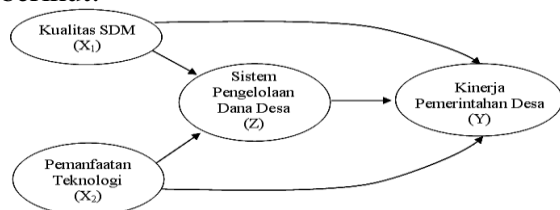
Terkait dengan kinerja pemerintah desa, teknologi informasi dapat dijadikan sebagai media untuk mempermudah dalam pengelolaan dana desa misalnya dalam penyusunan laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban lainnya. Selain itu, teknologi informasi dapat dijadikan media dalam pengambilan informasi terkait pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan lebih mudah. Internet memberikan kemudahan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa dengan pembuatan laman yang menyediakan laporan keuangan dana desa. Adanya keterbukaan tersebut menuntut aparatur desa untuk menjalankan perannya sebagai aktor utama dalam pengelolaan dana desa bekerja dengan sebaik mungkin dan melaporkan keadaan yang sebenarnya.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa kepala desa memiliki tugas untuk memanfaatkan teknologi yang tepat guna dalam menjalankan program, prioritas, kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan di desa. Pemanfaatan teknologi termasuk internet sebagai media keterbukaan pemerintah dalam melaporkan keadaan keuangan desa setiap desa untuk memiliki

perangkat yang memadai baik dalam pengadaan komputer, aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah dan akses jaringan internet. Selain itu, aparatur desa sebagai pengguna teknologi informasi harus memiliki kemampuan dalam pengoperasian teknologi informasi tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal akan meningkatkan kinerja keuangan pada pemerintahan desa, apabila sistem pengelolaan dana desa juga diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sehingga akan menghasilkan informasi keuangan yang tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya serta akan dapat mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan dan penyimpangan dalam pengolahan data transaksi serta pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, keterkaitan antar variabel yang satu dengan variabel yang lain dapat digambarkan dengan model kerangka konseptual sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka konseptual yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.
2. Pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.
3. Sistem pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.
4. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa.

5. Pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa.
6. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa.
7. Pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap sistem pengelolaan dana desa serta dampak terhadap kinerja pada pemerintah desa di Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan menyebarkan kuesioner pada aparatur desa di Kabupaten Deli Serdang.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintahan desa yang berada di Kabupaten Deli Serdang dengan total jumlah desa sebanyak 380 desa. Sampel dalam penelitian ini adalah desa-desa yang berada di Kecamatan Batang Kuis (11 Desa), Kecamatan Percut Sei Tuan (18 Desa) dan Kecamatan Tanjung Morawa (25 Desa) dengan total sampel desa yaitu sebanyak 54 desa. Pengambilan sampel atas responden dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud adalah para aparatur desa yang bertanggung jawab terkait pengelolaan dana desa yaitu: (1) kepala desa, (2) sekretaris desa dan (3) bendahara desa. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 162 responden dari 54 desa yang terdiri dari: kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa ($54 \times 3 = 162$).

Variabel pada penelitian ini terdiri atas variabel bebas (*independent*), variabel terikat (*dependent*) dan variabel antara (*intervening*).

1. Variabel bebas (*independent*) pada penelitian ini adalah kualitas SDM (X_1) dan pemanfaatan teknologi (X_2).
2. Variabel terikat (*dependent*) pada penelitian ini adalah kinerja pemerintahan desa (Y)
3. Variabel *intervening* pada penelitian ini adalah sistem pengelolaan dana desa (Z).

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner pada penelitian ini dikembangkan sendiri oleh peneliti melalui kajian teori yang relevan dengan variabel penelitian. Dalam pengukurannya, setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu pertanyaan menggunakan skala Likert.

Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan *software* statistik berupa program SPSS untuk menghasilkan uji kualitas data, statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Hipotesis diuji dengan menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur (*path analysis*) merupakan suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung.

Pada penelitian ini juga terdapat variabel *intervening* yaitu sistem pengelolaan dana desa. Untuk mendeteksi pengaruh *intervening* (mediasi) dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel dan dikenal dengan Uji Sobel (Sobel Test).

HASIL PENELITIAN

Hasil Analisis Jalur Substruktur 1

Hasil analisis regresi dengan bantuan program SPSS, diperoleh korelasi untuk substruktur 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Koefisien Jalur Substruktur 1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constants)	14,737	3,980		3,703	0,000
X1	0,235	0,050	0,255	4,664	0,000
X2	0,893	0,074	0,657	12,007	0,000

a. Dependent Variable: Z

Hasil pengujian koefisien jalur menunjukkan bahwa koefisien jalur dari X_1 ke Z dan dari X_2 ke Z, kedua-duanya secara statistik adalah bermakna (signifikan) dengan nilai Sig. < 0,05.

Tabel 2. Koefisien Determinasi Substruktur 1

Model Summary^b

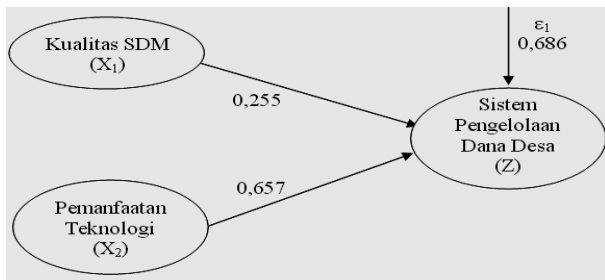
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,727 ^a	0,529	0,523	4,028

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Z

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh nilai R *square* (R^2) atau koefisien determinasi sebesar 0,529. Dari R *square* tersebut dapat dihitung koefisien jalur variabel lain di luar model yakni $\rho_{Z\epsilon}$ dengan rumus: $\rho_{Z\epsilon} = \sqrt{1-0,529} = 0,686$

Dengan demikian berdasarkan hasil-hasil analisis jalur substruktur 1 yang telah dilakukan maka dapat digambarkan diagram jalur, seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram Jalur Persamaan Substruktur 1

Persamaan substruktural 1 untuk diagram jalur di atas adalah sebagai berikut:

$$Z = 0,255 X_1 + 0,675 X_2 + 0,686 \epsilon$$

Tabel 3. ANOVA Substruktur 1

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2894,688	2	1447,344	89,211	0,000 ^a
	Residual	2579,590	159	16,224		
	Total	5474,278	161			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variabel: Z

Berdasarkan data pada Tabel 3 di atas, diperoleh nilai F-hitung sebesar 89,211 dengan nilai probabilitas (Sig.) 0,000. Karena nilai Sig. (p) < 0,05 sehingga disimpulkan terdapat hubungan atau pengaruh positif antara kualitas SDM (X_1) dan pemanfaatan teknologi (X_2) secara simultan terhadap sistem pengelolaan dana desa (Z).

Analisis Jalur Substruktur 2

Hasil analisis regresi dengan bantuan program SPSS, diperoleh korelasi untuk substruktur 2 sebagai berikut:

Tabel 4. Koefisien Jalur Substruktur 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constants)	7,826	2,576		3,309	0,003
X1	0,079	0,033	0,128	2,378	0,019

X2	0,134	0,064	0,147	2,102	0,037
Z	0,414	0,049	0,618	8,410	0,000

a. Dependent Variabel: Y

Hasil pengujian koefisien jalur menunjukkan bahwa koefisien jalur dari X_1 ke Y , dari X_2 ke Y dan dari Z ke Y , seluruhnya secara statistik adalah bermakna (signifikan) dengan nilai Sig. < 0,05.

Tabel 5. Koefisien Determinasi Substruktur 2

Model Summary^b

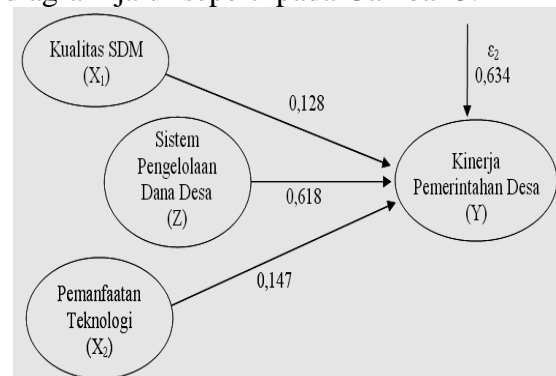
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,773 ^a	0,598	0,590	2,5

a. Predictors: (Constant), Z, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh nilai R square (R^2) atau koefisien determinasi sebesar 0,598. Dari R square tersebut dapat dihitung koefisien jalur variabel lain di luar model yakni $\rho_{Y\epsilon}$ dengan rumus: $\rho_{Y\epsilon} = \sqrt{1-0,598} = 0,634$

Dengan demikian berdasarkan hasil-hasil analisis jalur substruktur 2 yang telah dilakukan maka dapat digambarkan diagram jalur seperti pada Gambar 3.



Gambar 3. Diagram Jalur Persamaan Substruktur 2

Persamaan substruktural 2 untuk diagram jalur di atas adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,128 X_1 + 0,147 X_2 + 0,618 Z + 0,634 \epsilon$$

Tabel 6. ANOVA Substruktur 2

ANOVA ^b					
Model	Sum of	df	Mean	F	Sig.

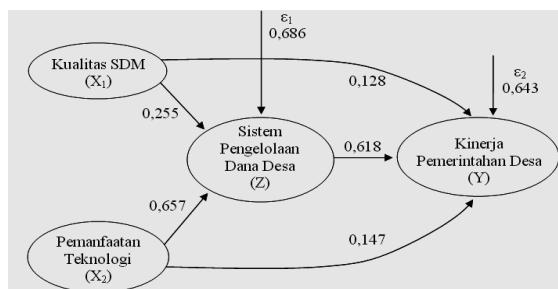
		Squares		Square		
1	Regression	1470,885	2	490,295	78,369	0,000 ^a
	Residual	988,479	158	6,256		
	Total	2459,364	161			

a. Predictors: (Constant), Z, X2, X1

b. Dependent Variabel: Y

Berdasarkan data pada Tabel 6 di atas, diperoleh nilai F-hitung sebesar 78,369 dengan nilai probabilitas (Sig.) 0,000. Karena nilai Sig. (p) < 0,05 sehingga disimpulkan terdapat hubungan atau pengaruh positif antara kualitas SDM (X_1), pemanfaatan teknologi (X_2) dan sistem pengelolaan dana desa (Z) secara simultan terhadap kinerja pemerintahan desa.

Hasil analisis jalur yang telah dilakukan dalam analisis substruktur 1 dan substruktur 2, dapat digambarkan model persamaan dua jalur seperti pada Gambar 4.



Gambar 4. Diagram Model Persamaan Dua Jalur

Dengan demikian, persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut:

$$Z = 0,255 X_1 + 0,657 X_2 + 0,686 \epsilon \dots \dots$$

(Persamaan Substruktur 1)

$$Y = 0,128 X_1 + 0,147 X_2 + 0,618 Z + 0,634 \epsilon \dots \dots$$

(Persamaan Substruktur 2)

Perhitungan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Pengaruh kualitas SDM (X_1) dan pemanfaatan teknologi (X_2) terhadap kinerja pemerintahan desa (Y) dengan sistem pengelolaan dana desa sebagai variabel *intervening* dapat dianalisis

menggunakan analisis jalur dengan menentukan nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung.

Tabel 7. Nilai Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Regresi	Koefisien Jalur (Beta)	Sig.	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total Pengaruh
$X_1 \rightarrow Z$	0,255	0,000	0,255		0,255
$X_2 \rightarrow Z$	0,657	0,000	0,657		0,657
$X_1 \rightarrow Y$	0,128	0,019	0,128	$0,255 \times 0,618 = 0,158$	0,286
$X_2 \rightarrow Y$	0,147	0,037	0,147	$0,657 \times 0,618 = 0,406$	0,553
$Z \rightarrow Y$	0,618	0,000	0,618		0,618

Berdasarkan hasil pada Tabel 7 di atas, dapat diberikan analisa sebagai berikut:

- Hasil regresi variabel X_1 dengan Z diperoleh nilai Sig. $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa, dengan besarnya pengaruh langsung sebesar 25,5%.
- Hasil regresi variabel X_2 dengan Z diperoleh nilai Sig. $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa, dengan besarnya pengaruh langsung sebesar 65,7%.
- Hasil regresi variabel X_1 dengan Y diperoleh nilai Sig. $0,019 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa, dengan besarnya pengaruh langsung sebesar 12,8% dan pengaruh tidak langsung (melalui sistem pengelolaan dana desa) sebesar 15,8% serta total pengaruh sebesar 28,6%.
- Hasil regresi variabel X_2 dengan Y diperoleh nilai Sig. $0,037 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa

pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa, dengan besarnya pengaruh langsung sebesar 14,7% dan pengaruh tidak langsung (melalui sistem pengelolaan dana desa) sebesar 40,6% serta total pengaruh sebesar 55,3%.

- e. Hasil regresi variabel Z dengan Y diperoleh nilai Sig. $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa, dengan besarnya pengaruh langsung yaitu sebesar 61,8%.

Uji Sobel

Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen (X_i) kepada variabel dependen (Y) melalui variabel *intervening* (Z).

- a. Hasil uji sobel antara variabel kualitas SDM (X_1), sistem pengelolaan dana desa (Z) dan kinerja pemerintah desa (Y) diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,342502. Karena nilai t-hitung $>$ t-tabel yaitu $2,34250 > 1,96$ maka dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana desa merupakan faktor *intervening* (perantara) positif antara pengaruh kualitas SDM terhadap kinerja pemerintahan desa. Hal ini juga mengindikasikan bahwa selain SDM yang berkualitas, pemerintahan desa juga harus memperhatikan peningkatan dan akuntabilitas sistem pengelolaan dana desa sehingga kinerja pemerintahan desa juga semakin meningkat. Oleh karena itu, kualitas SDM dan sistem pengelolaan dana desa yang akuntabel secara keseluruhan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan untuk meningkatkan kinerja pada pemerintahan desa.

- b. Hasil uji Sobel antara variabel pemanfaatan teknologi (X_2), sistem pengelolaan dana desa (Z) dan kinerja pemerintah desa (Y), diperoleh nilai t-hitung sebesar 5,076481. Karena nilai t-hitung $>$ t-tabel yaitu $5,076481 > 1,96$ maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana desa merupakan faktor *intervening* (perantara) positif antara pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kinerja pemerintahan desa. Hal ini juga mengindikasikan bahwa selain pemanfaatan teknologi yang optimal, pemerintahan desa juga harus memperhatikan peningkatan dan akuntabilitas sistem pengelolaan dana desa sehingga kinerja pemerintahan desa juga semakin meningkat. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi yang optimal dan sistem pengelolaan dana desa yang akuntabel secara keseluruhan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan untuk meningkatkan kinerja pada pemerintahan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa untuk menghasilkan kinerja yang baik (ekonomis, efisien dan efektif), maka pemerintahan desa harus memiliki SDM maupun aparatur desa yang berkualitas ditinjau dari pengetahuan, keterampilan, pelatihan maupun pengalaman. Dengan kata lain semakin baik atau semakin berkualitas sumber daya manusianya maka semakin baik pula kinerja pemerintahan desa.

2. Pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintahan desa akan semakin baik jika didukung dengan pemanfaatan teknologi yang baik pula. Dengan kata semakin baik atau semakin optimal pemanfaatan teknologi maka semakin baik pula kinerja pemerintahan desa.
3. Sistem pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintahan desa akan dapat dicapai dengan hasil yang baik jika pemerintahan desa dapat melaksanakan sistem pengelolaan dana desa dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Dengan kata lain semakin baik atau semakin akuntabel sistem pengelolaan dana desa maka semakin baik pula kinerja pemerintahan desa.
4. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin berkualitas sumber daya manusianya maka semakin baik atau semakin akuntabel pula sistem pengelolaan dana desa.
5. Pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik atau semakin optimal pemanfaatan teknologi maka semakin baik atau semakin akuntabel pula sistem pengelolaan dana desa.
6. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana desa merupakan faktor *intervening* (perantara) positif antara pengaruh kualitas SDM terhadap kinerja pemerintahan desa. Hal ini juga mengindikasikan bahwa selain SDM yang berkualitas, pemerintahan desa

juga harus memperhatikan peningkatan dan akuntabilitas sistem pengelolaan dana desa sehingga kinerja pemerintahan desa juga semakin meningkat. Oleh karena itu, kualitas SDM dan sistem pengelolaan dana desa yang akuntabel secara keseluruhan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa.

7. Pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana desa merupakan faktor *intervening* (perantara) positif antara pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kinerja pemerintahan desa. Hal ini juga mengindikasikan bahwa selain pemanfaatan teknologi yang optimal, pemerintahan desa juga harus memperhatikan peningkatan dan akuntabilitas sistem pengelolaan dana desa sehingga kinerja pemerintahan desa juga semakin meningkat. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi yang optimal dan sistem pengelolaan dana desa yang akuntabel secara keseluruhan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa.

SARAN

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan sistem pengelolaan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah desa di Kabupaten Deli Serdang khususnya di Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Tanjung Morawa untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki, salah

satunya dengan mengikutsertakan para aparatur atau perangkat desa dalam bimbingan teknologi maupun pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan sistem pengelolaan dana desa. Pemerintah desa juga diharapkan untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi yang ada secara optimal sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan kinerja pemerintahan desa.

2. Pemahaman tentang pengelolaan dana desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para aparatur desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dana desa. Oleh karena itu, maka diharapkan kepada pemerintah pusat maupun daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk lebih mensosialisasikan kembali aturan dan ketentuan penggunaan dana desa, melakukan pembekalan dan program pelatihan mengenai teknologi informasi dan sistem pengelolaan dana desa sehingga dihasilkan SDM atau aparatur desa yang berkualitas dan kompeten. Kepada pemerintah daerah juga diharapkan untuk dapat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun masyarakat dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai permasalahan penggunaan dana desa seperti penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, laporan fiktif, pemotongan anggaran maupun suap.
3. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat melanjutkan penelitian ini agar diperoleh hasil empirik yang lebih kuat dan komprehensif, dan disarankan untuk menambah variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan desa, misalnya variabel

pengawasan keuangan daerah atau variabel komitmen aparatur desa, serta disarankan untuk melakukan penelitian pada lokasi atau Kecamatan yang lainnya sehingga daya generalisasinya lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-shidiqq, E.A dan Wibisono, H. 2018. *“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa”*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 4 No. 1, Tahun 2018.
- Astuty, W. 2012. *“Pengaruh Lingkungan Bisnis terhadap Informasi Akuntansi Manajemen dan Penganggaran Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan”*. *Trikonomika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2012.
- _____. 2015. *“An Analysis of the Effects on Application of Management Accounting Information Systems and Quality Management Accounting Information”*. *Infotmation Management and Business Review*. Vol. 7, No. 3, June 2015.
- Aziiz, M.N dan Prastiti, S.D. 2019. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa”*. *Jurnal Akuntansi Aktual*. Vol. 6 No. 2, Juli 2019.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Candra, K.P.R.N. 2014. *“Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”*. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1 No. 6. Tahun 2014.
- Firdaus, Nadirsyah dan Fahlevi, H. 2015. *“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Kebijakan Akuntansi terhadap Kualitas Lapiran Keuangan*

- Pemerintah Kota Banda Aceh*". *Jurnal Magister Akuntansi, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 4 No. 1, Februari 2015.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- _____. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi III. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- _____. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, A dan Kusufi, M.S. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Harahap, L. 2017. "Selewengkan Dana Desa Ratusan Juta, Kades ini Ditahan Kejari Deliserdang". *Merdeka.com*, 21 Oktober 2017.
- Hariani, P.R.S. 2017a. "Analisis Perkembangan Ekonomi Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara. *Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI)*. Vol. 6, Tahun 2017.
- _____. 2017b. "Impact of ICTs Development on Economic Growth in Indonesia". *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*. Vol. 5 Issue 5 Ver. III, Sep. – Oct. 2017.
- Hariyani, D.S dan Sudrajat, M.A. 2016. "Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa Terhadap Penggunaan Teknologi Accounting Information System Pada Desa-Desa di Kabupaten Madiun". *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. Vol. 5 No. 2, Oktober 2016.
- Hendri, S.B.S., dkk. 2016. "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lombok Tengah". Conference on Management and Behavioral Studies, Universitas Tarumanagara, Jakarta, 27 Oktober 2016.
- Juliandi, A., Irfan, dan Manurung, S. 2014. *Metode Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. UMSU Press, Medan.
- Kadir, A dan Triwahyuni, T.C. 2013. *Pengantar Teknologi Informasi*. Andi, Yogyakarta.
- Khoiriah, S dan Meylina, U. 2017. "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa". *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 46 No. 1, Januari 2017.
- Koswara, E. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokratisasi dan Kemandirian Rakyat*. Sembradi Aksara Nusantara, Jakarta.
- Lengkong, V.P.K dan Tasik, H.H.D. 2018. "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014". *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*. Vol. 5 No. 1, Maret 2018.
- Magribi, A. 2019. "Penjabat (Pj) Kepala Desa Paya Itik Marlon Didakwa Terima Ratusan Juta dari Proyek Drainase Desa". *Tribun-Medan.com*, 5 Februari 2019.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Marlinawati dan Wardani, D.K. 2018. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa". *Jurnal Kajian Bisnis*. Vol. 26 No. 2, Juli 2018.
- Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif*

- Pembangunan.** RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2011. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Edisi III. Salemba Empat, Jakarta.
- Munti, F., dan Fahlevi, H. 2017. *“Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Aceh”*. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol. 18 No. 2, Juli 2017.
- Nafidah, L.N dan Anisa, N. 2017. *“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang”*. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol. 10 No. 2, Oktober 2017.
- Nordiawan, D dan Hertianti, A. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Noverman, Y. 2018. *“Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)”*. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Vol. 4 No. 2, Desember 2018.
- Novianti, I., Syamsidar dan Syawalina, C.F. 2018. *“Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Efektivitas Fungsi Pengawasan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar”*. *Balance*. Vol. XV No. 1, Januari 2018.
- Peraturan Bupati Deli Serdang No. 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Deli Serdang No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabuapten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Sumber Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Sumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN).
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.
- Primayana, dkk. 2014. *“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng)”*. *Jurnal Jurusan Akuntansi Program SI, Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 2 No. 1.
- Putriyanti, A. 2012. *“Penerapan Otonomi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo”*. *Jurnal E-Civics*. Vol. 1 No. 2.
- Romandhon. 2019. *“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Pengalaman Kerja Aparatur Desa, dan Fasilitas Kantor Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Aparatur Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)”*. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*. Vol. 2 No. 1, Februari 2019.
- Rulyanti, D., Sularso, R.A dan Sayekti, Y. 2017. *“Faktor-Faktor yang*

- Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening*". *Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 11 No. 3, September 2017.
- Sanjaya, S dan Rizky, M.F. 2018. "Analisis Profitabilitas dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspen (Persero) Medan". *KITABAH*. Vol. 2 No. 2, Juli – Desember 2018.
- Sapartiningsih, D, Suharno dan Kristianto, D. 2018. "Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol. 14 No. 1, Maret 2018.
- Sari, E.N. 2010. "Konsep Anggaran Dalam Perspektif Balance Scorecard: Suatu Tinjauan Teoritis". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 10, No. 2, September 2010.
- _____. 2013. "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan)". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 1, Maret 2013.
- Sari, E.N., dan Saragih, F. 2009. "Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Hotel Berbintang di Kota Medan". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 2, September 2013.
- Sari, M. 2014. "Entrepreneur terhadap Kinerja UKM di Kota Medan". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol.14, No.1, Maret 2014.
- _____. 2015. "Analisis Balanced Scorecard Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Perusahaan PT. Jamsostek Cabang Belawan". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol.15, No.1, Maret 2015.
- _____. 2018. "Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan". Prosiding: The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018 "Pemberdayaan dan Penguatan Daya Saing Bisnis dalam Era Digital.
- Sari, R dan Indriani, M. 2018. "Analisis Kinerja Pemerintah Desa dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif (Studi Pada Desa di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 3, No. 4, Tahun 2018.
- Sembiring, F.L. 2013. "Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat)". *E-Jurnal, Universitas Negeri Padang*.
- Sinambela, E., Saragih, F dan Sari, E.N. 018. "Analisis Struktur APBD dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara". *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 18, No. 2. Desember 2018.
- Sujarweni, V.W. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sumarjo, H. 2010. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

- Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)*". Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Suparman, W.E. 2014. *"Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng"*. e-Journal SI Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 2. No. 1. Tahun 2014.
- Sutarman. 2012. *Pengantar Teknologi Informasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Suyanto, M. 2005. *Pengantar Teknologi Informasi untuk Bisnis*. Andi, Yogyakarta.
- Triani, N.N.A dan Handayani, S. 2018. *"Praktik Pengelolaan Dana Desa"*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 9 No. 1, April 2018.
- Umami, R dan Nurodin, I. 2017. *"Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa"*. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi*. Vol. 6 No. 11, Oktober 2017.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wahyudi, M dan Wulandari, E. 2017. *"Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintahan Daerah Kota Magelang)"*. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*. Vol. 3 No. 2.
- Wanda, W. 2016. *"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua"*. *Jurnal EMBA*, Vol. 4, No. 3, September 2016.
- Wardani, D.K dan Andriyani, I. 2017. *"Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten"*. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*. Vol. 5 No. 2, Desember 2017.
- Wenny, C.D. 2012. *"Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan"*. *Forum Bisnis dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP*, Vol. 2 No. 1, September 2012.
- Wiguna, M.D.P, Yuniarta, G.A dan Prayudi, M.A. 2017. *"Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, serta Peran Pendamping Desa terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Pada Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Buleleng)"*. *Jurnal Akuntansi Program SI, e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 8 No. 2, Tahun 2017.
- Yesinia, N.I, Yuliati, N.C dan Puspitasari, D. 2018. *"Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa"*. *Jurnal Aset (Akuntansi Risei)*. Vol. 8 No. 1, 2018.
- Yosefrinaldi. 2013. *"Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barata)"*. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*. Vol. 1 No. 1, Tahun 2013.
- Yudianto, I dan Sugiarti, E. 2017. *"Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten"*

- Karawang)*”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 17 No. 1, Tahun 2017.*
- Yulianti dan Mangku. 2003. *Sosiologi Pedesaan.* Lappera Pustaka Utama, Jogjakarta.
- Yulihantini, D.T, Sukarno, H dan Wardayati, S.M. 2018. *“Pengaruh Belanja Modal dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian dan Kinerja Keuangan Desa di Kabupaten Jember.”. Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 12 No. 1, Januari 2018.*